

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA PEMATANG KABAU
KECAMATAN AIR HITAM KABUPATEN SAROLANGUN**

**EMPOWERMENT OF VILLAGE COMMUNITIES IN INCREASING THE
INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE COMMUNITY OF PEMATANG
KABAU VILLAGE, AIR HITAM DISTRICT,
SAROLANGUN REGENCY**

Asnawati Is¹, Fikriman², Setiono³, Akhyarnis Febrialdi⁴, Acep Sopandi⁴

^{1,2}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo,
^{3,4}Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo,
Jalan Diponegoro No. 27 – Rimbo Tengah, Muara Bungo – Jambi, Indonesia
asnawatia9@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat desa dalam peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat merupakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dengan permasalahan yang ada dimana belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur LPM desa dan kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan metode pelatihan dan pendampingan secara langsung. Hasil kegiatan pengabdian yaitu meningkatnya pemahaman kapasitas LPM dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing peserta telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara langsung dapat diaplikasikan langsung ke masyarakat dengan melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Desa Pematang Kabau

ABSTRACT

Empowering village communities in improving and strengthening community institutional capacity is a community service activity carried out in Pematang Kabau Village, Air Hitam District, Sarolangun Regency. This service activity aims to increase the institutional capacity of the community with existing problems where the quality of the village LPM apparatus resources is not yet optimal and the lack of institutional capacity of the village community in meeting community needs. The method used in this service activity is direct training and mentoring. The result of service activities is an increased understanding of LPM's capacity to help improve community welfare. Each participant has participated in a whole series of activities that can be applied directly to the community by carrying out the stages of empowerment.

Keywords: Community Empowerment, Institutions, Pematang Kabau Village

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau proses untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas masyarakat untuk mengenali, menangani, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya non konstruktif yang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi lokal dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektor instansi maupun LSM dan tokoh masyarakat. Menurut Noor (2011) pemberdayaan merupakan pemberdayaan ekonomi dalam rangka membangun suatu paradigma dalam suatu pembangunan yang bersifat *people centered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable*. Dijelaskan lebih lanjut bahwasanya pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka, namun lebih kepada bagaimana mereka mampu mengusahakan dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar pertumbuhan ekonomi naik dan mensejahterakan.

Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Awal dari masyarakat berasal dari hubungan antar-individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi suatu kelompok besar orang yang disebut masyarakat. Pengertian masyarakat secara umum adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat, masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ditemui kehidupan individu dengan masyarakat yang saling memengaruhi. Peran partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan pembangunan desa,

karena masyarakatlah yang mengetahui secara detail permasalahan dan potensi sumber daya yang ada untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Ruhana, 2018). Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa peran desa dalam menentukan, mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dari susunan pemerintahan serta asset yang dimiliki daerah secara hak otonomi asli sesuai dengan hukum adat. Sehingga desa memiliki kapasitas yang tinggi dalam eksistensinya terhadap perkembangan desa dengan didukung langsung oleh peran serta seluruh masyarakat desa. Hal itu dipertegas dengan pernyataan bahwa terdapat 3 otonomi daerah di Indonesia, yaitu ditingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa (Chotimah et al., 2019).

Guna terlaksananya pembangunan di daerah pedesaan sudah seharusnya dituntut kesiapan dan kemauan dari masyarakat desa itu sendiri untuk melakukan suatu pembangunan di desa dengan kekuatan mereka sendiri dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar pembangunan itu mencapai sasarannya yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Sehingga dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Desa harus menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut melalui lembaga Kemasyarakatan Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Selanjutnya Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Desa dalam menstimulasi dan memotivasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diharapkan akan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Pasal 3, Lembaga kemasyarakatan memiliki tugas yang meliputi:

1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong – royong dan swadaya masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan atau kemampuan masyarakat, sehingga dapat berkembang melalui suatu peningkatan keterampilan yang sudah ada atau potensi yang dimiliki. Upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat baik dari keluarga pra sejahtera, sejahtera 1 dan sejahtera 2.

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah setempat dapat menciptakan suatu program pemberdayaan yang dapat membuka lapangan pekerjaan serta dengan melakukan pendampingan oleh lembaga kemasyarakatan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Jadi pemberdayaan merupakan suatu hal yang dapat dipastikan bahwa individu mampu atau mempunyai potensi (kapasitas) dan kesempatan untuk membuat pilihan hidup

bagi mereka yang ingin mengalami kemajuan (Mardikanto, 2017)

Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Lembaga sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam hubungan kerja yang dinamis dan harmonis. Kegiatan ini diarahkan pada (1) pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui Perdes/SK Kades/Lurah, (2) peningkatan kapasitas manajemen Lembaga, (3) peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi Lembaga.

Tujuan kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan pengamatan di Desa Pematang Kabau yang merupakan bagian wilayah Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, ternyata Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum memiliki peran yang optimal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan baik kemampuan dalam menggerakkan masyarakat, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan. Sehingga beberapa hasil kerja dari pemerintahan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendamping dan pembinaan di masyarakat. Sehingga LPM dapat semakin paham tugas dan fungsinya dalam pembangunan nasional untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

METODOLOGI

Metode pelaksanaan yang diterapkan pada kegiatan pengabdian ini berupa pelatihan yang ditekankan dalam bentuk praktek langsung dan pembimbingan yang sifatnya mentoring. Pertama diberikan

kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) diawali dengan observasi dan sosialisasi tentang pentingnya kelembagaan masyarakat. Peran dan fungsi kelembagaan, partisipasi warga dalam mengoptimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan masyarakat desa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan untuk penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari beberapa tahap sebagaimana tersaji dalam gambar 1.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan

1. Observasi dan Sosialisasi
Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan pengamatan langsung ke Desa Pematang Kabau, serta mewawancarai para perangkat desa serta Lembaga Pemasarakatan Desa (LPM)
2. Forum Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada dan akan diselesaikan dalam kegiatan pengabdian ini.
3. Pelaksanaan
Tahap ini dilaksanakan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas LPM dalam membantu mengimplementasikan perencanaan pembangunan desa terutama pembangunan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Observasi dan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian diawali dengan kegiatan observasi ke lokasi pengabdian dengan wawancara secara mendalam terhadap kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pengurus BPD, serta pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sosialisasi dilakukan pada peserta kegiatan pengabdian, bertempat dikantor

Desa Pematang Kabau. Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada peserta tentang peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa oleh tim pengabdian. Kegiatan sosialisasi menjawab keraguan dan pertanyaan peserta kegiatan pengabdian melalui aktivitas penyampaian materi, tanya jawab dan diskusi. Penjelasan yang mengedepankan pendekatan kemasyarakatan mengakibatkan pemahaman masyarakat dan perangkat desa tentang peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat sangat baik.

2. Forum Group Discussion (FGD)

Berdasarkan hasil observasi dan sosialisasi yang didapat lalu dijadikan bahasan untuk menentukan solusi yang akan diberikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. FGD dilakukan setelah ada sosialisasi dengan penjelasan tentang pengelolaan kelembagaan masyarakat desa. Peserta sangat antusias menanggapi, bertanya dan berdiskusi tentang topik ini karena peserta ingin sekali mengelola Lembaga kemasyarakatan dengan baik sehingga Lembaga ini berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Jika kelembagaan masyarakat sudah kuat maka efeknya ke peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Pertanyaan terkait penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat di desa menarik karena banyaknya pertanyaan yang muncul yang mengarah kepada semangat untuk meningkatkan peranan kelembagaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya menjadi lebih baik dan sukses. Menurut kurniyati (2013), penguatan kapasitas kelembagaan di desa/kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat, merupakan salah satu model atau cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dirancang dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran dan pemberdayaan

masyarakat melalui LPM dan karang taruna untuk menopang perencanaan pembangunan, terutama perekonomian masyarakat.

3. Pelaksanaan

Kegiatan lanjutan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan melakukan pelatihan peningkatan kapasitas LPM, dimana sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan harus paham akan kelengkapan organisasi dan kepengurusan, manajemen Lembaga, kemampuan pengelolaan administrasi dan mengembangkan jaringan Kerjasama antar Lembaga.

Peserta kegiatan ini merupakan seluruh pengurus LPM, BPD dan masyarakat Desa Pematang Kabau dengan jumlah \pm 20 orang. Narasumber pada kegiatan pengabdian ini merupakan akademisi dari dosen program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo. Materi yang disampaikan adalah tentang pengorganisasian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan peran LPM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung dengan baik dan sukses.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2006 jelas didalamnya menegaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) merupakan salah satu Lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan desa, baik untuk menampung aspirasi masyarakat, Menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan desa, serta menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat desa.



Gambar 2. Pelatihan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan bahwa Seluruh peserta kegiatan pengabdian dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam sangat antusias.

Peserta pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan pengabdian ini dapat memahami apa saja peran dan fungsi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. 2019. Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 103
- Kurniyati, Y. 2013. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok PEW untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Yogyakarta. *Jurnal Maksipreneur*;

- Manajemen, Koperasi dan Entrepreneurship, 91
- Mardikanto, T., Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta
- Noor, M. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, I(2), pp. 87–99. doi: 10.31227/osf.io/weu8z
- Ruhana, F. 2018. Analisis Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 133-148